

Pengembangan Kurikulum dan Pengorganisasian Pengalaman Belajar IPS Siswa Sekolah Dasar

*Naila Saadah Ramadhani¹, Aditya Widiawan², Mega Arfiani³, Faizal Chan⁴, Silvina Noviyanti⁵

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Jambi, Indonesia

E-mail: nailaadhanii@gmail.com, adityawidiawan163@gmail.com, megasihite04@gmail.com,
faizal.chan@unja.ac.id, silvinanoviyanti@unja.ac.id

Article History: Submission: 2023-12-15 || Accepted: 2024-03-17 || Published: 2024-03-20

Sejarah Artikel: Penyerahan: 2023-12-15 || Diterima: 2024-03-17 || Dipublikasi: 2024-03-20

Abstract

Competency will be the key word in the national standard curriculum model reform paradigm. This type of research is literature research, related to the development of the social studies curriculum in elementary schools. Based on the results of a study of the development of the social studies curriculum in elementary schools from 1964 until now, it appears that the basic ideas of social studies in Indonesia were not entirely developed in the context of citizenship education, with a main orientation on developing basic civic competencies, but also developed in the context of social education, with a main orientation on developing basic social competencies. Understanding the nature and structure of Social Sciences competencies in elementary schools is an important aspect for competency-based curriculum reform to achieve the intended targets. So that the IPS-SD competencies are articulated at the practical level of learning in schools, the learning experiences that are developed are also oriented towards the specified competencies.

Keywords: Curriculum, Social Sciences, Elementary School.

Abstrak

Kompetensi akan menjadi kata kunci dalam paradigma reformasi model kurikulum standar nasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, terkait perkembangan kurikulum IPS di sekolah dasar, berdasarkan hasil kajian terhadap perkembangan kurikulum IPS-SD sejak tahun 1964 hingga sekarang, tampak bahwa dasar pemikiran IPS di Indonesia tidak seluruhnya dikembangkan di dalam konteks pendidikan kewarganegaraan dengan orientasi pokok pada pengembangan kompetensi dasar kewarganegaraan, melainkan juga dikembangkan dalam konteks pendidikan sosial, dengan orientasi pokok pada pengembangan kompetensi dasar sosial. Pemahaman terhadap hakikat dan struktur kompetensi IPS-SD merupakan aspek penting agar reformasi kurikulum berbasis kompetensi mencapai sasaran yang dicitakan. Agar kompetensi-kompetensi IPS-SD tersebut terartikulasikan pada tingkat praksis pembelajaran di sekolah, maka pengalaman belajar yang dikembangkan juga berorientasi dan berpijakan pada kompetensi-kompetensi yang ditetapkan.

Kata kunci: Kurikulum, Ilmu Pengetahuan Sosial, Sekolah Dasar.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Sejak Indonesia merdeka, kurikulum SD telah mengalami perubahan sebanyak delapan kali, yakni kurikulum 1947, 1950-an, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994 dan suplemennya tahun 1999, dan kurikulum 2004 yang juga dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). KBK-SD 2004 yang direncanakan untuk menggantikan kurikulum 1994 ternyata urung di-berlakukan lebih lanjut, sekalipun sosialisasi dan ujicoba secara terbatas di sekolah-sekolah telah dilakukan sejak lima tahun lalu di hampir tiap provinsi. Pembatalan pemberlakuan KBK 2004 menurut penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), karena kurikulum 2004 lebih sarat dengan isi tanpa standar kompetensi yang jelas. Sebagai gantinya, pada tahun 2006 ini direncanakan ada kurikulum baru, tetapi bukan KBK yang disusun 2004, melainkan "kuri-kulum baru" yang disusun

berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang dirumuskan oleh BSNP dan disahkan oleh Mendiknas (Kompas, 10 Februari 2006). Kurikulum baru tersebut (kurikulum 2006) masih belum dapat dipastikan namanya, apakah akan diberi label "Kurikulum 2006" atau "KBK 2006". Kalaupun atribut "KBK" nanti tidak secara eksplisit ditambahkan pada kurikulum baru, tak dapat dipungkiri bahwa "kompetensi" tetap akan menjadi kata kunci dalam paradigma reformasi model kurikulum standar nasional. Kepastian bahwa kurikulum baru tetap "*competency-based*" bisa dirujuk pada Permendiknas no. 22, 23, dan 24 tahun 2006 tentang Standar isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang pada Mei 2006 lalu disahkan oleh Mendiknas.

Komitmen untuk melakukan reformasi kurikulum berbasis kompetensi bukan tanpa alasan. Dunia pendidikan harus mampu meyakinkan bahwa SDM yang dihasilkannya harus mempunyai kompetensi yang mampu bersaing dalam era global. Oleh karenanya, program-program pendidikan yang ditawarkan juga harus mampu memberi bukti keterbentukan kemampuan/kompetensi yang dianggap relevan dengan era global. Dengan berbasis kompetensi, kurikulum akan menjadi terarah karena disusun dengan langkah-langkah yang sistematis, sehingga jika semuanya dikerjakan dengan benar dan implementasinya dilakukan secara taat asas, janji-janji yang terkemas dalam program pendidikan akan dapat diwujudkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan kurikulum IPS-SD dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah pribadi, masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari di lingkungan keluarga, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat secara umum.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data perpustakaan atau suatu penelitian yang objek penelitiannya dipelajari melalui berbagai informasi perpustakaan (buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan dokumen). Penelitian perpustakaan atau tinjauan literatur (tinjauan literatur, penelitian literatur) adalah suatu karya penelitian di mana informasi, ide atau temuan yang terkandung dalam literatur akademis diperiksa atau dievaluasi secara kritis dan kontribusi teoritis dan metodologis terhadap topik tertentu dirumuskan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis isi yang bisa digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan bisa meneliti kembali menurut konteksnya (Krippendorff, 1993). Dalam analisisnya akan dilakukan pemilihan, pembandingan, penggabungan, dan pemilihan sehingga ditemukan yang relevan (Sabarguna, 2005).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum

Prinsip Pengembangan Kurikulum KTSP dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi serta panduan dari BSNP. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip; Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya; Beragam dan terpadu; Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; Relevan dengan kebutuhan kehidupan; Menyeluruh dan berkesinambungan; Belajar sepanjang hayat; serta Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum Dalam pelaksanannya digunakan prinsip-prinsip, yaitu: Didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik b. Dilaksanakan dengan menegakan lima pilar belajar; Memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan belajar yang optimal; Dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai; Dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai dan memanfaatkan lingkungan sekitar; Dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, social dan budayanya; serta Mencakup seluruh komponen kempetensi mata pelajaran, mulok, dan pengembangan diri.

2. Dasar Pengembangan Kompetensi IPS di Indonesia

Berbeda dengan di Amerika Serikat, melacak dinamika historis-epistemologis IPS di Indonesia sangat sulit dilakukan. Sejumlah faktor penyebabnya antara lain: (1) karyakarya intelektual-keilmuan dari para pakar dan pengembang IPS di Indonesia lebih bersifat individual dan juga terdokumentasikan dalam kepus-takaan perorangan, tidak semuanya dipublikasikan; (2) organisasi yang menghimpun para pakar dan pengembang IPS di Indonesia, yaitu Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia (HISP IPSI) usianya masih relatif muda, baru terbentuk pada tahun 1991 (Somantri, 1991); (3) forum komunikasi dan seminar-seminar IPS baik berskala nasional maupun lokal, lebih ber-orientasi pada topik atau kajian fragmatiskontekstual daripada topik atau kajian epistemologis ke-IPS-an; dan (4) karya historiografi IPS di Indonesia hingga kini belum pernah disusun.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka upaya melakukan pelacakan terhadap dinamika historis-episte-mologis IPS di Indonesia hanya bisa dilakukan dengan mengkaji dinamika historis kurikulum IPS persekolahan sejak tahun 1964 hingga 2006 (cf. Winataputra, 1991). Akan tetapi, karena perubahan kurikulum selain didasarkan pada hasil penilaian nasional pendidikan (national assessment), juga didasarkan pada asumsi teoretik dan filofosis tertentu (Soedijarto, 2004), maka dari dokumen kurikulum pun bisa diidentifikasi dasar-dasar epistemologisnya.

Dari hasil kajian terhadap perkembangan kurikulum IPS-SD sejak tahun 1964 hingga sekarang, tampak bahwa dasar pemikiran IPS di Indonesia tidak seluruhnya dikembangkan di dalam konteks pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education*), dengan orientasi pokok pada pengembangan kompetensi dasar kewarganegaraan (*civic competencies*), melainkan juga dikembangkan dalam konteks pendidikan sosial (*social education*), dengan orientasi pokok pada pengembangan kompetensi dasar sosial (*social competencies*). Pada awal pertama masuk di dalam kurikulum persekolahan tahun 1964 hingga tahun 1968, pengembangan kompetensi IPS terintegrasi dengan kompetensi kewarganegaraan. Pada tahun 1964, IPS-SD bernama Pendidikan Kewargaan Negara, dengan orientasi pada pengembangan kompetensi “sosio-kultural” dan “moral” kewarganegaraan, yakni kemampuan siswa menjadi manusia susila yang cakap dan demokratis serta bertanggung jawab. Pada tahun 1968, IPS-SD bernama Pengetahuan Masyarakat, dengan orientasi pengembangan kompetensi tetap pada dimensi “sosio-kultural” dan “moral” kewarganegaraan.

Label IPS sebagai nama kurikulum SD mulai digunakan di dalam kurikulum 1975. Sejak kurikulum tahun 1975 ini pula, unsur pendidikan kewarganegaraan mulai dipisahkan dari IPS dan dimasukkan ke dalam matapelajaran tersendiri, yakni Pendidikan Moral Pancasila (PMP) (Depdikbud, 1975). Posisi ini terus dipertahankan dalam kurikulum 1984, 1986, 1994, KBK 2004 hingga kurikulum 2006. Pada revisi kurikulum 2004, memang pernah muncul gagasan untuk kembali mengintegrasikan dimensi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum IPS-SD dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial atau PKPS (Depdiknas, 2003). Akan tetapi PP. no. 15 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional dan Permendiknas no. 22 dan 23 tahun 2006 menetapkan bahwa IPS dan PKn merupakan dua matapelajaran yang berada di dalam dua kelompok matapelajaran yang terpisah dan sama-sama diajarkan di SD.

3. Struktur Kompetensi IPS-SD

Struktur kompetensi IPS dalam tulisan ini adalah pola organisasi kompetensi-kompetensi dalam suatu jalinan atau relasi sistemik yang saling berkaitan antara kompetensi yang satu dengan kompetensi yang lain sebagai sebuah totalitas atau kesatuan, yang terdapat di dalam standar isi dan standar kompetensi lulusan SD. Sebelumnya sudah dikemukakan, bahwa pengembangan kompetensi di dalam IPS-SD 2006 difokuskan tiga aspek kompetensi, yaitu kompetensi “sosiokeultural”, “intelektual keilmuan”, dan “personal”. Ketiga orientasi pengembangan kompetensi tersebut tampaknya dimaksudkan agar IPS-SD lebih diarahkan pada pengembangan “kemampuan-kemampuan dasar alamiah” (*native capacities, natural capabilities*) siswa dalam upaya mengembangkan jatidirinya sebagai makhluk personal, sosio-kultural, dan intelektual (Dewey, 1964). Sejumlah kompetensi sosiokultural yang dikembangkan di dalam IPS-SD berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan SD adalah

kemampuan:

- a. Memahami identitas keluarga, serta mewujudkan sikap saling menghormati dalam kemajemukan keluarga. Kompetensi ini dikembangkan pada diri siswa melalui pembentukan kemampuan: mengidentifikasi identitas keluarga dan kerabat; men-ceriterakan kasih sayang antar anggota keluarga; dan menunjukkan sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga.
- b. Mendeskripsikan kerja sama yang terjadi di dalamnya. Kompetensi ini dikembangkan pada diri siswa melalui pem-bentukan kemampuan: memberi contoh bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tetangga; dan memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan sekolah.
- c. Menghargai peranan tokoh pejuang dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kompetensi ini dikembangkan pada diri siswa melalui pembentukan kemampuan: mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang; menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia; menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan; dan menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan (Permendiknas no 22 dan 23 tahun 2006).

Dengan demikian, kompetensi-kompetensi yang dirumuskan di dalam IPS-SD benar-benar bersifat “mendasar” bagi setiap siswa dalam upaya membentuk dan membangun sendiri struktur pengetahuan/pengertian, keterampilan, nilai, sikap, dan tindakannya baik dalam konteks kehidupan pribadi, sosial, dan kultural; serta menjadi bagian integral dalam setiap ikhtiar siswa untuk membangun dan mengembangkan identitas, karakter, atau jatidirinya sebagai makhluk personal, sosiokultural dan intelektual.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pemahaman terhadap hakikat dan struktur kompetensi IPS-SD merupakan aspek penting agar reformasi kurikulum berbasis kompetensi mencapai sasaran yang dicitakan. Agar kompetensi-kompetensi IPS-SD tersebut terartikulasikan pada tingkat praksis pembelajaran di sekolah, maka pengalaman belajar yang dikembangkan juga berorientasi dan berpijak pada kompetensi-kompetensi yang ditetapkan bersifat “mendasar” bagi setiap siswa dalam upaya membentuk dan membangun sendiri struktur pengetahuan/pengertian, keterampilan, nilai, sikap, dan tindakannya baik dalam konteks kehidupan pribadi, sosial, dan kultural, serta menjadi bagian integral dalam setiap ikhtiar siswa untuk membangun dan mengembangkan identitas, karakter, atau jatidirinya sebagai makhluk personal, sosiokultural dan intelektual.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian di atas, bahwa dalam upaya mengembangkan dan menetapkan kompetensi kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial di sekolah dasar hendaknya berorientasi pada pengalaman belajar siswa.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, A. 2011. Ilmu Sosial Dasar. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alleman, J.E. & Rosaen, C.E. (1991). The Cognitive, Social, Emoti-onal, and Moral Development Characteristics of Students: Basic for Elementary and Middle School Social Studies. Dalam James P. Shaver, (ed). Handbook of Research on Social Studies Teaching and Learning. New York: McMillan Publishing Company. 109-120.
- Arief Achmad MSP. (2004). Quo Vadis, Pendidikan IPS di Indone-sia? Dalam Pendidikan Network. (Versi elektronik).
- Asmin. (2001). Konsep dan Metoda Pembelajaran Untuk Orang De-wasa (Versi elektronik). Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 034. 25-32. Astawa, & Ida, B, 2017. Pengantar Ilmu Sosial. Depok: Rajawali Pers
- Banks, J.A. (1995). Transformative Challenges to the Social Sciences Disciplines: Implications for Social

Studies Teaching and Learning. Dalam Theory and Research in Social Education, XXIII(1), 2-20.

Barr, R.D., Barth, J.L., & Shermis, S.S. (1977). Defining the Social Studies. Virginia: National Council for the Social Studies.

Brassard, L. (2001). "Recapitulation Theory of Cognition". Tersedia di: <http://www.webnow.com/herbart>. [29-10- 2002]

Brameld, T. (1966). Philosophy of Education in Cultural Perspective. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Brophy, J. & Alleman, J. (1996). Powerful Social Studies for Elementary Studies. Florida: Harcourt Brace & Company.

Bruner, J.S. (1978). The Process of Education. Cambridge: Harvard University Press.

Clark, D. (2000). Herbart's System of Philosophy. Tersedia di: <http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/history/history.html>. [29-10-2002]

Depdikbud. (1975). Buku Garis-garis Besar Program Pengajaran Bidang Studi Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta.

Depdikbud. (1986). Kurikulum Sekolah Dasar: Garis-garis Besar Program Pengajaran Mata-pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Depdikbud.

Depdikbud. (1994). Kurikulum Sekolah Dasar: Garis-garis Besar Program Pengajaran Mata-pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Depdikbud.

Depdiknas. (2001). Kurikulum Berbasis Kompetensi: Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Ilmu Sosial untuk Sekolah Dasar. Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum Depdiknas.

Depdiknas. (2003a). Kurikulum Berbasis Kompetensi: Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pengetahuan Sosial SD & MI. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas.

Depdiknas. (2003b). Pelayanan Profesional Kurikulum 2004: Belajar Mengajar yang Efektif. Jakarta: Puskur-Depdiknas.

Dewey, J. (1910). How We Think. tersedia di: www.spartan.ac.brocku.ca/~lward/dewey/dewey1910.html [10 Juni 2002].

Dimyati, M. (1989). Pengajaran Ilmu-ilmu Sosial di Sekolah: Bagian Integral Sistem Ilmu Pengetahuan. Jakarta: Depdiknas, Ditjen Dikti, P2LPTK.

Farisi, M.I. (2005). Rekonstruksi Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial berdasarkan Perspektif Konstruktivisme. Disertasi Doktor. Tidak diterbitkan. PPS Universitas Pendidikan Indonesia.

Gunawan & Rudi. 2013. Pendidikan IPS: Filosofi, Konsep dan Aplikasi, Bandung: Alfabeta.

Hasan, S.H. (1993). Tujuan Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial (JPIS). edisi perdana. 92-101.

Hasan, S.H. (1996). Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial. (Buku Satu). Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS-IKIP.

Hopeman, Teofilus Ardian, Nur Hidayah, and Winda Arum Anggraeni. "Hakikat, Tujuan dan Karakteristik Pembelajaran IPS Yang Bermakna Pada Peserta Didik Sekolah Dasar." Jurnal Kiprah Pendidikan 1.3 (2022): 141-149.

Hursh, D.W. & Ross, E.W. (2000). Democratic Social Education: Social Studies for Social Change. dalam

- Hursh, D.W. & Ross, E.W. (eds). *Democratic Social Education: Social Studies for Social Change*. New York & London: Falmer Press. 1-22.
- Jantz, R.K. & Klaweitter, K. (1985). Early Childhood/Elementary Social Studies: A Review of Recent Research. Dalam Stanley, W.B. (ed). *Review of research in Social Studies Education: 1976-1983*. New York: NCSS. 65-122.
- Jarolimek, J. (1977). *Social Studies in Elementary School*, (5th ed). New York: Mc Millan Publishing Co, Ltd., Collier McMillan Publisher Company.
- Joyce, B. & Weil, M. (1986), *Teaching*, Santa Monica, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Kalidjernih, F.K. (2005). Post-Colonial Citizenship Education: A Critical Study of the Production and Reproduction of the 19 Indonesian Civic Ideal. Thesis Doctor of Philosophy, unpublished. University of Tasmania. KBK Tidak Jadi: Kurikulum Baru Disesuaikan Standar Isi Kompetensi. (10 Februari 2006). Dalam Kompas.
- Lapp, D, et.al. (1975). *Teaching and Learning: Philosophical, Psychological, Curricular Applications*. New York: Macmillan Publishing Co., Inc.
- Lybarger, M.B (1991). The Historiography of Social Studies: Retrospect, Circumspect, and Prospect, dalam Shaver, J.P. (eds). *Handbook of Research on Social Studies Teaching and Learning*. New York: Macmillan Publishing Company. 3-15.
- Martorella, P.H. (1985). *Elementary Social Studies: Developing Reflective, Competent, and Concerned Citizens*. Boston, Toronto: Little, Brown and Company.
- NCSS. (1989). *Charting A Course: Social Studies for the 21st Century (A Report of the Curriculum Task Force of the National Commission on Social Studies in the Schools)*. Washington: NCSS.
- NCSS. (1994). *Expectations of Excellence: Curriculum Standards for Social Studies*. Washington: NCSS.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
- Popkewitz, T.S. & Maurice, H.S. (1991). *Social Studies Education and Theory: Science, Knowledge, and History*. dalam Shaver, J.P. (ed). *Handbook of Research on Social Studies Teaching and Learning*. New York: Macmillan Publishing Company. 27-40.
- Saxe, D.W. (1991). *Social Studies in Schools: A History of The early Years*. New York: State University of New York Press.
- Saxe, D.W. (1994). *Social Studies for the Elementary Teacher*. Boston: Allyn and Bacon.
- Soetjipto, R. ed. (1980). *Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Depdikbud.
- Somantri, N. (1991). "Jatidiri (Iden-titas) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial-IKIP dan

Jurusan Pendidikan IPS FKIPUniversitas". Makalah disampaikan pada Forum Komunikasi FPIPS-IKIP dan JPIPSFKIP-Universitas se Indonesia, Yogyakarta.

Somantri, N. (2001). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Dedi Supriadi & Rohmat Mulyana (eds). Bandung: PPS-FPIPS UPI dan PT. Remadja Rosda Karya.

Stopsky, F. & Lee, S.S. (1994). Social Studies in a Global Society. Columbia: Delmar Publ. Inc.

Sumaatmadja, N. (2003). Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. No.20 Tahun XI, edisi Januari – Juni. 28-35.

Sumantri, M. (2002). Pengembangan Potensi Siswa dengan Kurikulum Terpadu untuk menjadi Manusia Indonesia Seutuhnya. Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar tetap dalam bidang Ilmu Perencanaan Kurikulum pada FIP-UPI. Bandung:UPI.

Tuxworth, E. (1995). Competence Based Education and Training: Background and Origins. dalam Burke, J. (ed). Competency-Based Education and Training. London-New York: The Palmer Press.

Wardani, I.G.A.K. (2003). Kurikulum Berbasis Kompetensi: Apa, Mengapa, dan Bagaimana Implementasinya. *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1 nomor 4.

Winataputra, U.S. (2001). Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pen-didikan IPS). Disertasi Doktor, tidak diterbitkan, PPS Universitas Pendidikan Indonesia.

Wiriaatmadja, R. (2003). Pembelajaran IPS di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. No.20 Tahun XI, edisi Januari – Juni. 22-27.

Wyner, N.B & Farquhar, E. (1991). Cognitive, Emotional, and Social Development: Early Childhood Social Studies. dalam James P. Shaver (ed), *Handbook of Research on Social Studies Teaching and Learning*, New York: McMillan Publishing Company. 109- 120